



## Menuju Integrasi Ekonomi ASEAN: Implementasi Local Currency Settlement Antara Indonesia, Malaysia, Dan Thailand

Safina Rahma Syifa

Universitas Brawijaya

---

### Abstract

Received: 03 Januari 2024

Revised: 10 Januari 2024

Accepted: 18 Januari 2024

*The cooperation between Indonesia, Malaysia and Thailand has been exists for a long time since the beginning of the formation of ASEAN. Local currency settlement framework agreement between the three countries exists to help increasing the use of local currency (Indonesia Rupiah, Malaysia Ringgit, and Thailand Baht) in trade transactions between themselves. The three countries are used to conducting international trade transactions using foreign currencies instead of local currencies, especially US Dollar. Therefore, the Local Currency Settlement (LCS) framework was made to reduce dependence on US Dollar. The LCS framework then also helps in increasing sub-regional trade between Indonesia, Malaysia, and Thailand, and also encourage investment between the countries.*

**Keywords:** *Local Currency Settlement, International Trade, Indonesia-Malaysia-Thailand*

(\*) Corresponding Author: [safinarsyifa@student.ub.ac.id](mailto:safinarsyifa@student.ub.ac.id)

**How to Cite:** Syifa, S. R. (2024). Menuju Integrasi Ekonomi ASEAN: Implementasi Local Currency Settlement Antara Indonesia, Malaysia, Dan Thailand. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10533243>.

---

### PENDAHULUAN

Mata uang merupakan bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam suatu wilayah atau negara dan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Seluruh mata uang memiliki nilai tukar yang bersifat relatif terhadap mata uang lainnya, yang ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingginya permintaan dan penawaran dari mata uang tersebut seperti inflasi, stabilitas ekonomi, dan lain lain. Umumnya, negara-negara di dunia mengacu pada penggunaan Dolar Amerika Serikat (USD) dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Hegemoni dari penggunaan USD sebagai bentuk mata uang dunia diakibatkan oleh keberadaan Perjanjian Bretton Woods di tahun 1944. Dominasi penggunaan USD dalam perdagangan internasional sendiri tidak hanya terbatas dalam lingkup perdagangan yang melibatkan Amerika Serikat sebagai mitra dagang, tetapi juga termasuk transaksi yang tidak melibatkan Amerika Serikat seperti transaksi perdagangan bilateral dan multilateral di antara negara-negara dalam kawasan Asia Tenggara (Kamasa, 2014).

Dominasi penggunaan USD dalam perdagangan yang dilakukan antar negara dalam sebuah kawasan kemudian menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki kecenderungan untuk mengikuti kebijakan yang ada dan berkaitan dengan Amerika Serikat sebagai sebuah entitas negara secara keseluruhan. Penggunaan USD dalam perdagangan internasional pada periode 1999-2019 diperkirakan mencapai 79% di seluruh dunia (Bertaut, Beschwitz, & Curcuru, 2021). Eropa menjadi satu-satunya kawasan yang menjadi pengecualian, di mana penggunaan euro sebagai mata uang tunggal dalam kawasan lebih dominan. Oleh karena itu, dalam usaha untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari dominasi

penggunaan USD, kerangka penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antar negara dalam satu kawasan yang sama mulai digalakan untuk melindungi kawasan tersebut dari ancaman yang berasal dari luar kawasan. Pada 11 Desember 2017, tiga bank sentral dari anggota ASEAN, yaitu Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank Thailand meluncurkan kerangka Local Currency Settlement (LCS) yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan di antara ketiga negara tersebut.

Dalam upaya memudahkan transaksi dalam LCS, kemudian dibentuk kerangka LCS yang berdasarkan Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) pada tanggal 11 Desember 2017 dengan menunjuk 7 Bank BUMN dan swasta di Indonesia, 6 Bank ACCD untuk Malaysia serta 5 Bank ACCD untuk Thailand (Bank Indonesia, 2019). Bank Indonesia sebagai bank central di Indonesia mendukung kesepakatan ini dengan menerbitkan ketentuan LCS kepada perbankan Indonesia yaitu PBI No.19/11/PBI/2017 mengenai Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank yang mulai diberlakukan pada 2 Januari 2018. Dibentuknya Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) untuk mempermudah transaksi dan bank- bank sentral pemerintah maupun swasta dalam melakukan transaksi dagang ini, melakukan transfer dana maupun pembukaan rekening dalam mata uang lokal ataupun mata uang negara mitra. ACCD ini dibentuk hasil kesepakatan antara dua negara yang memiliki kriteria serta kualifikasi yang telah ditentukan.

Pembentukan dari kerangka LCS ini memiliki tujuan untuk mencapai beberapa kondisi, seperti; 1) meningkatkan ikatan perdagangan yang dimiliki antara Indonesia-Malaysia-Thailand; 2) mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan ekspor dan impor sebagai usaha mengurangi ketergantungan terhadap USD; 3) menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri serta mengurangi risiko yang mungkin dapat mengganggu kestabilan dari sistem keuangan negara (Asian Development Bank, 2017). Dalam lingkup perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand, keberadaan kerangka LCS dilihat sebagai bentuk solusi yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan yang terjadi dan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dari kawasan ASEAN secara keseluruhan.

Implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan diharapkan dapat mengurangi risiko terkait fluktuasi nilai tukar dan memungkinkan pihak yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih stabil. Selain itu, biasa transaksi juga dapat lebih ditekan karena proses menukarkan mata uang lokal menjadi mata uang asing sudah tidak diperlukan lagi. Pada dasarnya keberadaan dari kerangka LCS berusaha untuk memberi kemudahan dan mendorong kenaikan perdagangan internasional antar negara. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa penerapan kerangka LCS juga memiliki tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya kesadaran dan juga pemahaman pihak yang terlibat mengenai kerangka ini. Selain itu juga terdapat risiko perubahan nilai tukar yang tidak dapat diprediksi akibat kebijakan moneter dan politik nasional negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang dilakukan bersama antara pemerintahan terkait dan juga sektor swasta untuk menghindari tantangan tersebut dan memperkuat implementasi kerangka LCS sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi negara terkait dan juga kawasan

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional telah menjadi kegiatan ekonomi terpenting dalam perekonomian dunia. Meningkatnya saling ketergantungan negara dengan mengedepankan upaya kerja sama antar negara dalam mewujudkan perdamaian, menjadi pendorong perdagangan internasional untuk tumbuh lebih cepat. Pemenuhan permintaan yang semakin tinggi menuntun pola perdagangan internasional yang semakin kompleks sehingga terus menambah bagian dari aktivitas global (Bjelic, 2008). Dalam proses perdagangan, tentu tidak lepas dari kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi ini merupakan hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama antara pihak penjual dan pembeli. Dalam skala internasional, setiap negara tentu terlibat pada kegiatan perdagangan (eksport-impor) yang mana didalamnya memuat kegiatan transaksi antara satu negara dengan negara lainnya.

Dalam transaksi perdagangan internasional, bank sentral dan bank swasta berperan penting dalam memfasilitasi pembayaran keuangan internasional (Wonnacott, Robinson, & Bertrand, 2020). Adapun upaya dalam memfasilitasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam membentuk kesepakatan bersama melalui kerjasama kerangka Local Currency Settlement. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana penguatan perdagangan dilakukan melalui sebuah alternatif penyelesaian transaksi dagang dengan mata uang lokal untuk mendorong stabilitas keuangan negara dan mengurangi ketergantungan terhadap USD.

### **Kerja Sama Sub-Regional**

Sub-regional memainkan peran penting dalam integrasi ekonomi ASEAN. Meski tidak melibatkan anggotanya secara keseluruhan, kerjasama subregional di ASEAN dipandang mampu menjadi fasilitator dan pelengkap kerjasama di tingkat regional. Min and Myo mendefinisikan *growth triangles* atau kerjasama sub-regional sebagai zona ekonomi transnasional yang terbentang luas dengan batas tertentu, meliputi tiga atau lebih negara yang memiliki kedekatan wilayah dimana perbedaan faktor pendukung dieksploitasi untuk mempromosikan perdagangan dan investasi external (Tang & Thant, 1994).

Mengutip dari Chaia Siow Yue (1997) dijelaskan bahwa terdapat beberapa keunggulan dan manfaat dari implementasi kerja sama pada level sub-regional (Riyanto, 2015). Diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan kerja sama pada level sub-regional dapat menjadi salah satu alternatif apabila terdapat hambatan atau kendala dari ketercapaian tujuan kerja sama ekonomi pada tingkat regional secara utuh. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara-negara pelaku kerja sama umumnya terjadi karena ada perbedaan tahapan pembangunan ekonomi pada level regional, serta ditambah dengan adanya perbedaan pandang sistem politik dan ekonomi di dalamnya.
2. Implementasi dari pelaksanaan kerja sama sub-regional umumnya lebih mudah dilaksanakan dan dikelola secara politik, serta dianggap lebih fleksibel dalam menjalankan setiap peranan. karena kerja sama sub-regional tidak memiliki ketentuan ketetapan yang ketat, dalam arti menyesuaikan dengan kesepakatan pelaku kerja sama. Pelaksanaan kerja sama sub-regional pada dasarnya

memiliki lingkup yang kecil, namun hal ini tentu menjadi alternatif dari berbagai kendala dan hambatan yang timbul atas framework dari kegiatan kerja sama politik dan ekonomi yang jauh lebih kompleks dan beresiko pada tingkat regional. Kendati demikian, keberhasilan dari kerja sama sub-regional tentu dapat juga diaplikasikan pada lingkup regional yang lebih utuh.

3. Kerja sama sub-regional dapat membantu para pengambil kebijakan dalam menentukan potensi pembangunan ekonomi melalui konektivitas wilayah negara yang terbelakang supaya lebih maju.
4. Kerja sama subregional yang berfokus pada bidang ekonomi memberi ruang pada negara pelaku kerja sama untuk yang saling melengkapi (*economic complementarity*).

Jose L. Tongzon mengidentifikasi beberapa hal yang membuat kerjasama sub-regional yang ada di ASEAN menjadi *building block* dari kerjasama regional ASEAN secara keseluruhan, diantaranya kerjasama sub-regional dianggap mampu membangun rasa percaya diri dan saling percaya untuk menjalin kerjasama yang lebih besar di tingkat regional (Tongzon, 2002). Kerjasama subregional juga menjadi ranah uji coba dan menjadi alat dalam mentransformasi keunggulan komparatif nasional menjadi keunggulan komparatif regional. Selain itu, sub-regionalisme mendorong kerjasama regional melalui proses *economization of politics*, dengan meredakan ketegangan di ranah politik dan keamanan, serta mengedepankan persamaan terutama kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melakukan analisis dalam memenuhi tujuan penelitian. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan *internet based research* diantaranya yaitu artikel jurnal, buku-buku, laporan lembaga penelitian, dokumen pemerintah Indonesia, laman resmi pemerintah dan lembaga, serta tulisan media terkemuka. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknis analisis Yin diantaranya sebagai berikut; mengumpulkan, kategorisasi data, verifikasi data, intepretasi data, dan pembuatan kesimpulan (Yin, 2016).

## **PEMBAHASAN**

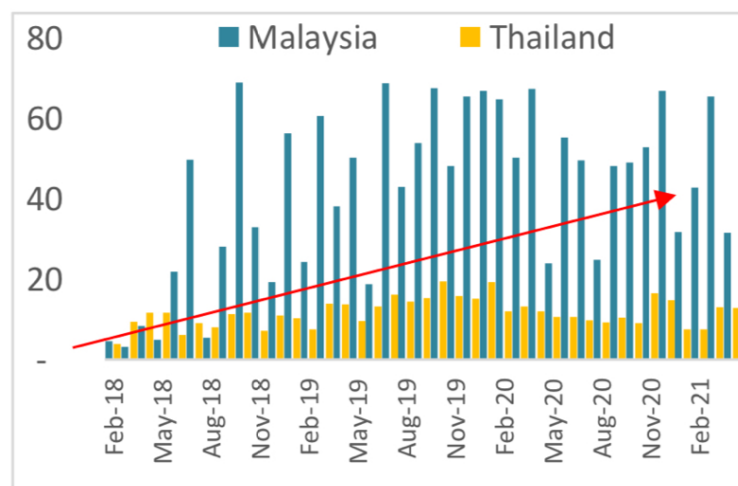
### **Implementasi *Local Currency Settlement***

Kerjasama yang terjadi antara Indonesia, Malaysia dan Thailand sendiri sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari awal terbentuknya ASEAN. Sebelumnya juga sudah terjalin kerjasama ekonomi ketiga negara dengan nama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang berdiri pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Langkawi, Malaysia pada 20 Juli 1993 (Kemenlu, 2019). Hadirnya kerangka LCS membantu meningkatkan penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi perdagangan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, memberikan efisiensi yang lebih besar bagi eksportir, importir, dan investor untuk mengakses Rupiah, Baht, Ringgit di ketiga negara tersebut dalam menyelesaikan perdagangan antar negara.

Perkembangan dari mulai dilakukannya implementasi kesepakatan LCS secara efektif oleh Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand menunjukkan respon yang cenderung positif. Bank Indonesia pun menyatakan bahwa jika dilihat secara

keseluruhan setelah disepakatinya LCS, transaksi mata uang lokal antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengalami peningkatan. Penggunaan mata uang lokal Ringgit Malaysia mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berada pada nilai 22,5 juta dolar AS pada tahun 2018 menjadi 49,6 juta dolar AS pada tahun 2019 dan kemudian meningkat lagi hingga lebih dari 50 juta dolar AS pada tahun 2020 (Sjamsudin, 2021). Sementara itu, penggunaan mata uang Thailan Baht juga menunjukkan peningkatan dari total 9,2 juta dolar AS di tahun 2018 menjadi 13,7 juta dolar AS pada tahun 2019. Namun, ternyata pandemi COVID-19 di tahun 2020 memberi dampak dalam penggunaan mata uang lokal dan menyebabkan penurunan transaksi baht menjadi 12,1 juta dolar AS (Sjamsudin, 2021).

**Gambar 1.** Total Transaksi Mata Uang Lokal Baht dan Ringgit di Indonesia (juta dolar AS).



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa perkembangan penggunaan LCS di Indonesia terhadap Ringgit Malaysia dan Thailand Bath berada di arah yang positif dan progresif. Meskipun begitu, nilai transaksi mata uang lokal Indonesia terhadap Ringgit masih lebih besar jika dibandingkan dengan nilai transaksi mata uang lokal yang terjadi antara Indonesia dengan Baht. Bentuk implementasi dari kesepakatan LCS yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun antar negara yang terlibat sudah memberi pilihan dan manfaat terhadap pihak-pihak pelaku usaha sebagai aktor yang terlibat dalam transaksi perdagangan dalam kawasan (Nofansya & Sidik, 2022).

**Tabel 1.** Total Transaksi LCS Indonesia terhadap Malaysia dan Thailand (Ribu USD)

Tahun	Malaysia	Thailand
2018	247,305	101,158
2019	595,476	164,390
2020	616,713	147,941
2021	637,384	237,913

Jika melihat pada tabel di atas, bisa dipahami bahwa terjadi peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun dalam perkembangan transaksi LCS yang dilakukan oleh Indosea terhadap Malaysia dan Thailand. Meskipun untuk tahun

2020, karena imbas dari tingginya kasus COVID-19, terjadi sedikit penurunan transaksi LCS yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Thailand. Namun jika melihat total transaksi LCS yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia selama empat tahun berturut-turut terlihat terus mengalami peningkatan yang progresif setiap tahunnya. Namun, meskipun terlihat terus mengalami peningkatan yang positif, total transaksi LCS yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia masih cenderung rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia yang mencapai angka total 21 Miliar pada tahun 2021 (Kementrian Perdagangan, 2022).

### **Pengurangan Penggunaan Dolar**

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 yang bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada bulan Mei lalu, para pemimpin negara-negara anggota yang terlibat menyatakan bahwa anggota ASEAN harus lebih menggalakan penggunaan mata uang lokal dalam pelaksanaan perdagangan intra-regional (Ghifari, 2023). Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan yang terjadi antar negara dan juga untuk melindungi wilayah regional dari ancaman eksternal. ASEAN sebagai entitas regional juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam menyelesaikan sebuah transaksi dibandingkan dengan menggunakan dolar AS yang merupakan mata uang utama dari perdagangan internasional.

Gubernur Bank Indonesia ke-16, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa Bank Indonesia akan terus berupaya dalam mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal antar negara kawasan (Puspadini, 2023). Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi karena dengan menggunakan mata uang lokal, proses transaksi yang terjadi juga semakin singkat karena menghilangkan proses konversi mata uang lokal ke dolar AS dan dari dolar AS ke mata uang lokal. Upaya dalam pengurangan penggunaan dolar AS atau biasa dikenal sebagai de-dolarisasi melalui *LCS Framework* sendiri memiliki hasil yang progresif tercermin dari menurunnya penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan yang dilakukan antar negara.

Hal tersebut terlihat di mana transaksi perdagangan yang terjadi di antara Indonesia dengan Thailand pada periode tahun 2017 hingga 2018 mencapai angka 16,3 miliar dolar AS dengan total 90% transaksi dilakukan menggunakan dolar AS (Suryanto, 2020). Sedangkan transaksi perdagangan Indonesia dengan Malaysia mencapai total 94% transaksi dilakukan dengan menggunakan dolar AS. Namun, setelah disepakati dan diterapkannya LCS, transaksi perdagangan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand menggunakan mata uang lokal meningkat dan mencapai angka 1,19 triliun rupiah secara keseluruhan. Keberadaan LCS membuat terjadinya peningkatan penggunaan mata uang lokal yang kemudian akan membantu proses pengurangan keluarannya mata uang asing.

Meskipun penggunaan dolar AS masih belum bisa tergantikan sepenuhnya dalam waktu dekat, dolar AS secara keseluruhan mengalami penurunan status sebagai cadangan mata uang utama dunia menurut data IMF. Dolar AS yang dulunya menguasai 70% dari total cadangan mata uang utama dunia, dalam dua tahun belakangan ini hanya berada pada angka 59% (IMF, 2023). Keberadaan dari fenomena dedolarisasi ini sendiri tidak hanya disebabkan oleh keberadaan LCS tetapi juga terjadi karena perubahan dinamika yang ada dalam ekonomi global. Secara keseluruhan, kecenderungan terjadinya de-dolarisasi diyakini banyak pihak

dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang signifikan terhadap perekonomian lokal di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global.

### **Peningkatan Integrasi Ekonomi Intra-Regional**

Kesepakatan *LCS Framework* yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah menghasilkan keuntungan bagi negara yang terlibat. Keberadaan kesepakatan LCS menghasilkan skema transaksi antar mata uang lokal secara langsung tanpa perlu membuat pelaku usaha menukarkan mata uang lokal ke dalam bentuk dolar AS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dengan kemudahan yang dihasilkan dari keberadaan *LCS Framework*, diharapkan penggunaan rupiah, ringgit, dan bath lebih sering lagi digunakan dalam transaksi yang terjadi antara Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Dengan meningkatnya penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan intra-regional, diharapkan juga kecenderungan dependensi terhadap dolar AS bisa berkurang dan perdagangan intra-regional antar negara yang terlibat semakin meningkat.

Selain dari bidang perdagangan, keberadaan kesepakatan LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga dimaksudkan untuk mendorong tingkat investasi yang terjadi di antara tiga negara yang terlibat. Kemudahan yang dihasilkan dari kerangka LCS diharapkan dapat mendorong para investor dan pelaku usaha dari ketiga negara terlibat untuk memanfaatkan keuntungan yang ada dan melakukan investasi intra-regional secara langsung. Para investor juga dapat mengambil keputusan dan mengelola investasi yang dilakukannya sendiri berdasarkan kondisi ekonomi intra-regional yang terjadi dan bukan mengambil keputusan berdasarkan faktor eksternal yang mungkin memengaruhi. Berdasarkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia yang dirilis oleh BI juga menunjukkan terjadinya peningkatan transaksi Indonesia dalam bentuk investasi langsung setelah keberadaan kesepakatan LCS (Bank Indonesia, 2023b).

Keberadaan dari kesepakatan LCS juga memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat umum ketika melakukan transaksi jual beli pada ketiga negara tersebut. Kerangka LCS menghadirkan kondisi di mana masyarakat umum dapat berbelanja dengan menggunakan mata uang lokal ketiga negara yang terlibat tanpa perlu melakukan konversi terhadap dolar AS. Contohnya saja, masyarakat Indonesia yang sedang berlibur di Thailand dapat berbelanja dengan nyaman tanpa perlu menukar uang yang dimilikinya ke mata uang baht terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena dalam kerangka LCS juga terdapat upaya integrasi pembayaran dengan menggunakan metode memindai kode QR atau dikenal dengan nama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia. Sementara untuk QRIS Malaysia masih berada pada tahap uji coba (Bank Indonesia, 2023a).

### **KESIMPULAN**

Tulisan ini menjabarkan mengenai kerangka *Local Currency Settlement* (LCS) yang disepakati oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan yang dimiliki oleh sebuah negara terhadap dolar AS, namun tidak sepenuhnya menghilangkan penggunaan dolar AS. Keberadaan dari LCS sendiri diharapkan dapat memudahkan transaksi perdagangan ekspor, impor, dan juga investasi antar negara serta mendukung stabilitas nilai tukar mata uang lokal. Dengan menggunakan kerangka LCS, para pelaku usaha yang terlibat dalam ekspor dan impor dapat mengeluarkan biaya yang

lebih rendah ketika melakukan transaksi dibandingkan jika menggunakan dolar AS sebagai nilai tukar. Selain mempermudah proses perdagangan, kerangka LCS juga memberikan opsi baru bagi para investor untuk melakukan investasi secara langsung tanpa menggunakan dolar AS. Aspek ini diharapkan dapat menaikkan minat investor untuk berinvestasi menggunakan mata uang lokal dalam lingkup Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023a, February 27). QRIS antarnegara : Jajan di Luar Negeri bisa Pake Rupiah! Retrieved August 2, 2023, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QRIS-antar-negara.aspx>
- Bank Indonesia. (2023b, June 19). Posisi Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Triwulan I 2023 Meningkat. Retrieved August 2, 2023, from [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2516223.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2516223.aspx)
- Bjelic, P. (2008). FOUNDATIONS OF THE NEW CONCEPT OF INTERNATIONAL TRADE. *ICES*, (October). Sarajevo. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/related/41543/imt-gt-implementation-blueprint-2017-2021.pdf%0A>
- Ghifari, D. (2023, May 12). Defying the dollar: Asean pushes for greater local currency use - Asia News Network. Retrieved August 22, 2023, from <https://asianews.network/defying-the-dollar-asean-pushes-for-greater-local-currency-use/>
- IMF. (2023). *World Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves*. Retrieved from <https://data.imf.org/regular.aspx?key=41175>
- Kemenlu. (2019). Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Retrieved May 29, 2023, from [https://kemlu.go.id/portal/id/read/162/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-malaysia-thailand-growth-triangle-imt-gt#!](https://kemlu.go.id/portal/id/read/162/halaman_list_lainnya/indonesia-malaysia-thailand-growth-triangle-imt-gt#!)
- Kementerian Perdagangan. (2022). NERACA PERDAGANGAN INDONESIA & MALAYSIA. Retrieved June 14, 2023, from <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>
- Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework dalam Memfasilitasi Perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 164–178. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/40478/18157>
- Puspadini, M. (2023, May 8). Bos BI Buka Fakta Kekuatan Dolar di Dunia Turun Drastis. Retrieved August 2, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230508182713-17-435560/bos-bi-buka-fakta-kekuatan-dolar-di-dunia-turun-drastis>
- Riyanto, B. (2015). Peran dan Tantangan Kerjasama Subregional dalam Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Pendekatan Multilevel Governance. *Insignia Journal of International Relations*, 2(02), 28. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2015.2.02.456>

- Sjamsudin, R. (2021). *Webinar - Local Currency Settlement Framework Indonesia - Tiongkok*. Retrieved from <https://www.youtube.com/live/gj3nmh75OrM?feature=share>
- Suryanto, V. (2020). Kerjasama LCS Indonesia-Thailand diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dolar AS. Retrieved August 2, 2023, from <https://nasional.kontan.co.id/news/kerjasama-lcs-indonesia-thailand-diharapkan-dapat-mengurangi-ketergantungan-dolar-as>
- Tang, M., & Thant, M. (1994). *Growth triangles: conceptual issues and operational problems*. Manila: Asian Development Bank.
- Tongzon, J. L. (2002). *The Economies of Southeast Asia* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Wonnacott, P., Robinson, R., & Bertrand, T. J. (2020). International Trade. Retrieved May 15, 2023, from <https://www.britannica.com/money/topic/international-trade/Arguments-for-and-against-interference>
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.